

**IMPLEMENTASI PENDEKATAN *BOTTOM-UP* DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN
MINAHASA SELATAN**

*Riedel legi
W. Y. Rompas, msi
Jericho d. Pombengi*

ABSTRAK

This study aims to determine how the Implementation of Bottom-Up Approach in Rural Development Planning in The Subdistrict Tumpaan South Minahasa District, also to determine the extent of Implementation of Bottom-Up Approach in Rural Development Planning can encourage community participation in rural development in Sub Tumpaan South Minahasa District,

In the methods used in this research is descriptive-qualitative method. Research conducted in four villages that was taken from 10 villages in the District Tumpaan. Informant studies taken from various related elements, namely The Village Head, BPD, LPM, and Leaders/ Community Leaders entirety as many as 16 people. Data collection using interview techniques. The analysis technique used is qualitative analysis interactive models of Miler and Hubermann.

Based on the research result deduced: (1) Implementation of a bottom-up approach to development planning in the village has been able to do well in the village in the subdistrict Tumpaan; (2) Implementation of bottom-up approach the planning of Rural Development must be supported by harmonious cooperation between the relevant institution; (3) The implementation of bottom-up approach the Rural Development planning is also supported by the participation of the entire community

Keyword : Bottom-Up Approach, Rural Development Planning

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal dan hidup di daerah pedesaan.

Keanekaragaman kemiskinan dan keterbatasan tersebut menurunkan kualitas dan melemahkan semangat dan kemampuan masyarakat desa (Bryant dan White, 1985). Dengan keadaan masyarakat desa yang demikian itu maka sangat wajarlah apabila pembangunan desa dan masyarakat desa beroleh perhatian yang besar dan prioritas yang tinggi dalam kerangka pembangunan nasional bangsa Indonesia sejak awal-awal pembangunan dicanangkan pada masa pemerintahan orde lama, masa orde baru, hingga masa reformasi sekarang ini.

Sebagaimana diketahui bahwa konsepsi pembangunan desa yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia selama ini ialah menjadikan masyarakat desa sebagai obyek (Sasaran) dan sekaligus sebagai subyek (Alat) dari proses pembangunan desa itu sendiri. Dalam konsep pembangunan desa yang demikian itu maka pemerintah hanya berperan sebagai pemberi arahan (mengarahkan), bimbingan, dan bantuan fasilitas yang diperlukan; sedangkan masyarakat adalah merupakan pemeran utamanya. Dengan kata lain, inisiatif,

prakarsa dan partisipasi masyarakat merupakan faktor utama pembangunan desa, sedangkan pemerintah hanyalah berperan memberikan arahan, bimbingan dan bantuan fasilitas yang diperlukan.

Berdasarkan kenyataan pembangunan desa selama ini, terlihat adanya dua kecenderungan utama dari individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat desa dalam hubungan dengan partisipasi dalam pembangunan desa, yaitu : pertama, partisipasi yang muncul karena prakarsa atau inisiatif sendiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat (sering disebut partisipasi sukarela), dan kedua, ialah partisipasi bukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri masyarakat yang bersangkutan, tetapi karena digerakkan atau dimobilisasi oleh pemerintah (kadang-kadang mengandung unsur paksaan). Partisipasi bentuk kedua ini memang dibutuhkan terutama pada tahap-tahap awal pembangunan desa dimana kesadaran atau inisiatif masyarakat masih perlu dibimbing oleh pemerintah; akan tetapi manakala kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat maka pendekatan yang sifatnya *top down* ini perlu dikurangi, dan sebaliknya pembangunan desa sedapat mungkin dilaksanakan berdasarkan

pendekatan yang sifatnya *bottom-up* (Taliziduhu, 1997).

Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa terus ditingkatkan pelaksanaannya di era otonomi daerah sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 63, bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa. Kemudian dalam penjelasan umum PP ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat.

Agar pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif, maka pemerintah desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, dan lainnya). Seperti di sebutkan dalam PP 72 Tahun 2005 pasal 91, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai Tugas: (1) Menyusun Rencana Secara Partisipatif, (2) Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan, Memelihara dan Mengembangkan pembangunan secara

partisipatif, (3) Menggerakkan dan Mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat, dan (4) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dari pengamatan selama ini, khususnya di wilayah Kecamatan Tumpaan, menunjukkan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa belum maksimal dapat dilaksanakan secara efektif. Program-program pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa masih lebih mencerminkan keinginan dari kepala desa dan perangkatnya ataupun pengurus LMD dan LPM, sehingga seringkali tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, dari pengamatan menunjukkan adanya beberapa kendala dalam implementasi pendekatan *bottom-up* ini dalam perencanaan pembangunan desa, seperti : (1) belum berfungsinya secara maksimal Lembaga Kemasyarakatan (LPM) dalam melaksanakan tugasnya membantu pemerintah desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa; (2) koordinasi antara lembaga-lembaga di desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa masih lemah; (3) kemampuan SDM aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan di

desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa masih kurang/rendah. Beberapa kelemahan tersebut dapat menyebabkan perencanaan pembangunan desa secara *bottom-up* tidak berjalan maksimal dan efektif sebagaimana yang diharapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian ini ialah implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Tumpa, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya adalah penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji suatu hipotesis (Arikunto, 2002). Berdasarkan pengertian atau makna penelitian kualitatif tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

A. Definisi Konsep Fokus Penelitian

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsep dan definisi operasional. Dalam definisi konsep, peneliti berusaha menggambarkan batasan dari variabel yang hendak diteliti

(Keban, 1998). Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun dan Effendy, 2002).

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah “Pendekatan *Bottom-Up* Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”. Dalam hal ini, secara konseptual pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa didefinisikan sebagai pendekatan perencanaan pembangunan desa dari bawah ke atas yaitu perencanaan pembangunan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM) dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

B. Sumber Data (Informan)

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan konten, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang digunakan

dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau pengambilan informan dengan sengaja.

Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa yaitu : unsur Pemerintah Desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan unsur warga masyarakat. Informan/sumber data tersebut akan diambil di 4 (empat) Desa sampel yang dipilih secara random dari 10 desa yang ada di kecamatan Tumpaan yaitu Desa Tumpaan, Desa Matani, Desa Lelema, dan Desa Tangkuney. Dengan demikian jumlah seluruh informan dalam adalah 16 orang.

Instrument dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif sumber data utama ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006). Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Wawancara (Interview).

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan lebih dahulu (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).

2. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian terutama di kantor camat dan kantor kepala desa.

3. Observasi.

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena nyata yang berhubungan dengan focus penelitian

ini. Data hasil observasi ini merupakan pendukung data primer hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Kecamatan Tumpaan

Kecamatan Tumpaan merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 10 (sepuluh desa). Sebagian wilayah Kecamatan Tumpaan berada pada pesisir pantai dengan ketinggian dari permukaan laut adalah 1 Meter sampai 22 Meter. Kecamatan

Tumpaan terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sulta.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tatapaan

Kecamatan Tumpaan mempunyai luas wilayah 210,6 Km² yang terbagi pada sebanyak 10 Desa yang ada di kecamatan ini. Sedangkan Jumlah penduduk Kecamatan Tumpaan Desember 2012 yaitu sebanyak 15.434 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.969 jiwa atau 51,63% dan perempuan sebanyak 7.465 jiwa atau 48,37%.

Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Wawancara

Secara konseptual yang dimaksudkan dengan perencanaan pembangunan desa disini ialah proses penyusunan rencana pembangunan di tingkat desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP. No.72 Tahun 2005 pasal 63. Kemudian, yang dimaksud dengan pendekatan *bottom-up* disini ialah

perencanaan atau penyusunan rencana pembangunan desa dengan pendekatan dari bawah ke atas yang dibuat oleh pemerintah desa dan lembaga terkait di desa (BPD dan LPM) yang melibatkan semua komponen atau unsur masyarakat di desa yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat disini ialah dukungan partisipasi masyarakat desa terhadap pelaksanaan rencana atau program pembangunan desa yang telah ditetapkan melalui pendekatan *bottom-up* tersebut.

Untuk mengungkap bagaimana implementasi perencanaan pembangunan desa dengan pendekatan *bottom-up*, dan apakah pendekatan perencanaan pembangunan desa secara *bottom-up* itu dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa, maka dilakukan wawancara terhadap sebanyak 16 orang informan yang diambil dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur LPM, dan unsur warga masyarakat di empat desa yang terpilih secara lokasi sampel penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan (lihat lampiran 1).

2. Rangkuman Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan para informan tentang implementasi pendekatan bottom-

up dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tumpaen sebagaimana telah dideskripsikan di atas, dapat dibuat rangkuman sebagai berikut:

- a. Semua informan yang diwawancarai di empat desa baik Kepala Desa atau Hukum Tua, ketua/anggota BPD, ketua/anggota LPM, dan tokoh/warga masyarakat menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa di desa mereka baik berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) disusun berdasarkan pendekatan *bottom-up* (partisipatif), karena dibuat/dibahas melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa yang melibatkan/mengikutsertakan semua unsur terkait yaitu terutama BPD dan LPM, dan juga organisasi/kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan dan keagamaan, dan para tokoh/pemuka masyarakat desa. Aspirasi dan usulan rencana program pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat dari tingkat dusun/jaga dan yang disampaikan oleh organisasi atau kelompok masyarakat dan tokoh/pemuka masyarakat dibahas dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga program yang

ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak warga desa umumnya. Semua informan menyatakan bahwa pengambilan keputusan penetapan rencana program pembangunan desa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut diambil secara demokratis setelah mempertimbangkan semua usulan, dan aspirasi yang berkembang selama proses musyawarah. Semua informan juga menyatakan bahwa keputusan rencana program yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan (diinformasikan dan dijelaskan) secara transparan kepada masyarakat oleh kepala desa/perangkat desa, BPD, LPM, dan juga oleh para Kepala Dusun/Jaga, sehingga selalu dapat diterima oleh masyarakat.

- b. Semua informan yang diwawancarai di empat desa baik Kepala Desa/Hukum Tua, ketua/anggota BPD, ketua/anggota LPM, tokoh dan warga masyarakat desa menyatakan bahwa implementasi pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan di desa mereka telah dapat mendorong partisipasi masyarakat. Para informan semuanya menyatakan bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan desa

yang ditetapkan dengan pendekatan *bottom-up* tersebut selalu mendapat dukungan dari organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Semua informan juga menyatakan bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan desa yang telah ditetapkan dengan pendekatan *bottom-up* itu selalu mendapat dukungan partisipasi warga desa yaitu dengan memberikan sumbangan dana, materi dan tenaga sesuai kemampuan masyarakat itu sendiri.

Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka di atas bahwa perencanaan pembangunan desa dengan pendekatan *bottom-up* atau sering juga disebut pendekatan partisipatif adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat. Dan seperti yang dikatakan oleh Marzuki (2004) bahwa ada dua ciri penting dari pendekatan *bottom-up* (partisipatif) dalam pembangunan desa, yaitu : (1) adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi

keputusan program; dan (2) bahwa masyarakat setempat sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program dengan dukungan pemerintah.

Menurut Jamiesson (dalam Marzuki, 2004), ada dua perspektif yang mendasari paradigma pembangunan pendekatan *bottom-up* atau partisipatif yaitu: (1) melibatkan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola-pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh; dan (2) membuat umpan-balik (*feedback*) terhadap program/proyek yang pada dasarnya merupakan bagian tak terlepas dari kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan *bottom up* dalam semua tahapan atau proses pembangunan desa ialah: (1) mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan desa; (2) menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan; (3)

dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa; dan (4) munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

Penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa di wilayah kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan sudah dapat dilakukan dengan baik. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan nrencana kerja pembangunan (RKP-Desa) disusun oleh pemerintahan desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa yang melibatkan/mengikutsertakan semua unsur terkait yaitu terutama BPD dan LPM, dan juga organisasi/kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan dan keagamaan, dan para tokoh/pemuka masyarakat desa. Aspirasi dan usulan rencana program pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat dari tingkat dusun/jaga dan yang disampaikan oleh organisasi/kelompok masyarakat dan tokoh/pemuka masyarakat dibahas dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga program yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak warga desa umumnya. Pengambilan

keputusan penetapan rencana program pembangunan desa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut diambil secara demokratis setelah mempertimbangkan semua usulan, dan aspirasi yang berkembang selama proses musyawarah.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa pada desa-desa di wilayah kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ternyata dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa mereka. Program-program pembangunan desa yang perencanaannya disusun dengan pendekatan *bottom-up* selalu dapat diterima dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaannya baik berupa sumbangan dana/material maupun tenaga. Ini dapat dimaknai bahwa perencanaan pembangunan desa secara *bottom-up* efektif mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa mereka. Sebagaimana hasil penelitian dari Bryant dan White (1985) yang mengemukakan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa sangat efektif karena : (1) melalui pendekatan *bottom-up* masyarakat dapat memberi

tanggapan, jawaban atau feed-back kepada pihak pemerintah mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan, dan lainnya; (2) melalui pendekatan *bottom-up* masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada masyarakat; (3) melalui pendekatan *bottom-up* dapat terjadi tawar-menawar, permufakatan atau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah; (4) melalui pendekatan *bottom-up* dapat terjadi proses *exchange* antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapatlah dinyatakan bahwa implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa secara baik dan benar akan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi; artinya semakin baik implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan di desa maka akan semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, implikasi penting dari penelitian ini adalah pemerintahan desa harus berupaya dapat mengimplementasikan pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa di kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa sudah dapat dilakukan dengan baik di desa-desa di wilayah Kecamatan Tumpa, karena semua rencana program pembangunan desa (baik RPJMD maupun RKP-Desa) dibuat/disusun dan ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat desa yang melibatkan berbagai unsur/lembaga terkait (BPD, LPM, Perangkat Desa), dan juga unsur organisasi/kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan dan keagamaan, dan para tokoh/pemuka masyarakat desa.
2. Implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Tumpa telah dapat mendorong partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan setiap program yang ditetapkan tersebut. Setiap rencana program pembangunan desa yang disusun

selalu dapat diterima dan mendapat dukungan organisasi/kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan juga partisipasi warga desa baik dalam bentuk sumbangan dana dan material maupun partisipasi tenaga.

Saran

Bertolak dari hasil penellian ini maka dapatlah direkomendasikan saran kepada para pengambil kebijakan ataupun pihak-pihak terakit, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, para Kepala Desa dan Perangkat Desa, ketua/anggota BPD, dan ketua/anggota LPM perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai di bidang perencanaan pembangunan.
2. Implementasi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan desa harus didukung pula oleh adanya kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang terkait dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa terutama antara kepala desa,

perangkat desa, BPD dan LPM. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik dan saling menghargai kewenangan masing-masing diantara lembaga-lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Beratha I. Nyoman, 1992, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bryant Coralie dan Louise White, 1985, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, Jakarta, LP3ES.
- Cohen, John dan Norman Uphoff, 1977, *Rural Development Participation*, Cornnel University Press.
- Hartoyo dkk, 1986, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Modul UT, Jakarta, Kanurika UT.
- Marzuki Muhammad, 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Mubyarto, 1984, *Strategi Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta, P3PK- UGM.
- Moeleong, L. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosdakarya.
- Ohama, Y., 1999, *Kerangka Teoritis dan Metode-Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*, Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.
- Poerwadarminta, S., 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Singarimbun, M. Dan Sofian Effendy, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Siagian, S.P., 1994, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung.
- Syamsi Ibnu, 1996, *Pokok-Pokok Perencanaan, Pemrograman, dan Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Taliziduhu Ndraha, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara

Sumber-sumber lain:

UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

PP. No.72 Tahun 2005 tentang Desa